



**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TENTANG ORGANISASI PAPUA MERDEKA**

### **3.1 Kondisi Historis Papua**

Luas wilayah Papua adalah 421.981 KM<sup>2</sup> (3,5 kali lebih besar dari pada Pulau Jawa) dengan topografi yang meliputi daerah pegunungan dan sebagian besar tanah yang berawarawa di daerah pesisir. Papua berbatasan dengan; Laut Halmahera dan Samudra Pasifik di utara, Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua Laut Arafura dan Australia di selatan, Papua New Guinea di sebelah timur, dan Laut Arafura, Laut Banda dan Maluku di sebelah barat. Total penduduk Papua adalah sekitar 2.576.822 jiwa, yang hanyalah 1% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, di mana 70% tinggal di daerah pedesaan dan di tengah daerah pegunungan yang terpencil. Berdasarkan sensus pada tahun 2000, populasi terpadat ada di dataran tinggi di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 417.326 jiwa. Total penduduk asli, yang kaya akan kebudayaan, diperkirakan sekitar 66% dari keseluruhan jumlah penduduk.

Penelitian di bidang Antropologi mengkategorikan tujuh zona kebudayaan di seluruh tanah Papua: (1) Saireri, (2) Doberai, (3) Bomberai, (4) Ha-Anim, (5) Tabi, (6) Lano-Pago, and (7) Me-Pago. Ada lebih dari 250 kelompok etnis dengan kebiasaan-kebiasaan, bahasa-bahasa, praktik-praktik dan agama asli yang berbeda di Papua. Ini berarti, ada ratusan norma adat yang berlaku di dalam propinsi ini. Ditambah lagi, ada 100 kelompok etnis non-Papua. Pengaruh kesukuan masih sangatlah kuat, oleh karenanya insiden-insiden yang menampakkan ketidakpedulian terhadap keharmonisan sosial biasanya akan berujung pada tindak kekerasan.<sup>128</sup>

Masyarakat Papua bukanlah suatu entitas yang homogen. Kepapuaan baru dibangun secara terbatas bersamaan dengan tumbuhnya lapisan kecil elit terdidik melalui Sekolah Pamong Praja yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada 1940-an. Di sana pendidikan administrasi pemerintahan dijalani. Pada kesempatan itu para pelajar Papua banyak berdiskusi tentang persoalan kepapuaan dan kemungkinan Papua Barat menjadi satu negara bangsa yang merdeka. Pada awal 1960-an sudah disiapkan bendera nasional, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Pada 1 Desember 1961 dengan bantuan Belanda diproklamasikan Negara Papua Barat.<sup>129</sup>

Pemerintah Belanda menyatakan hak atas Irian Jaya bagian barat-daya dan mendirikan benteng *de Bus* di teluk Triton pada tahun 1828, 20 tahun kemudian Belanda mendaulat West New Guinea dan menjadi sebagian Koloni Belanda. Dari tahun 1848 sampai perang dunia kedua Irian Jaya diperintah Belanda. Belanda menyerahkan semua bekas propinsinya, kecuali Irian Jaya menurut keputusan yang dibentuk di konferensi yang diselenggarakan tanggal 23 Agustus-2 Nopember 1949.

Sejak awal tahun 1950 Belanda memfokuskan diri pada pembangunan politik di Irian Barat sebagai upaya untuk mencegah Indonesia mendapatkan dukungan dari luar negeri atas persoalan Irian Barat, yaitu dengan cara meningkatkan persepsi bahwa wilayah Irian Barat dapat merdeka sendiri. Beberapa partai politik pada saat itu ada yang pro-Indonesia dan sebagian lainnya pro-Belanda. Di antara gerakan politik pro-Indonesia adalah gerakan pemuda Iryan (bukan Irian) yang dianggap disusupi oleh pemimpin nasional Indonesia di Irian Barat, maka dilarang oleh Belanda pada tahun 1961. Pada bulan Januari Belanda menyetujui berdirinya delapan partai politik di Irian Barat. Partai politik itu antara lain:

---

128 Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua* (Jakarta:Friederich Ebert Stiftung, 2008), hlm. 3-4

129 Decki Natalis Pigay, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000) hlm. 285

1. Partai Demokrasi Rakyat, ketua: Arnold Runtubuy; sekretaris: Mozes Romainum; bendahara: Petrus Moabuay. Partai ini didirikan pada tahun 1957 dan mempunyai tujuan untuk bersatu dengan Papua Niugini dalam Federasi Melanesia.
2. Partai Nasional, ketua: Herman Wajoi; wakil ketua: Amos Indey; sekretaris: S. Martin Bela dan Frits M. Kirihio. Partai ini mempunyai tujuan untuk mempersiapkan orang-orang Papua menuju penentuan nasib sendiri dibawah pengawasan dan petunjuk Belanda.
3. Partai New Guinea Bersatu, ketua: Ludwijk Mandatjan; wakil ketua: H. F.W. Gosewisch. Partai ini mempunyai tujuan untuk mencapai kemerdekaan politik sebelum tahun 1975 dalam kaitannya dengan Belanda, Antilles dan Suriname.
4. Partai Serikat Pemuda Papua, ketua: Johan Wamaer, anggota terbatas pada orang-orang Papua dan partai ini mempunyai tujuan untuk mencapai kemerdekaan dibawah pengawasan PBB.
5. Partai Persatuan Orang New Guinea, ketua: Johan Ariks. Partai ini mempunyai tujuan untuk merdeka tanpa target tanggal dan anggotanya terbatas pada orang-orang Papua.
6. Partai Kekuatan Menuju Persatuan atau Kena U Embay, ketua: Ezau Itaar; wakil ketua: Anas Kereuta; bendahara: Willem Ossoway. Partai ini mempunyai tujuan menuju kemerdekaan sesudah itu bekerja dalam kaitan dengan Belanda.
7. Partai Rakyat, ketua: Husain Warwey; wakil ketua: Luis Rumaropen; sekretaris: M. Ongge, dan Z. Abaa.
8. Persatuan Kristen-Islam Raja Ampat, ketua: Muhammed Nur Majalibit; sekretaris: J. Rajar; penasehat pertama: Abdullah Arfan. Partai ini bekerja sama dengan Belanda untuk mencapai kemakmuran di New Guinea Belanda, dan bersandar pada hasil-hasil daerah.<sup>130</sup>

Pada tanggal 19 Oktober 1961 Belanda membentuk Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang. Komite Nasional ini bertugas untuk merencanakan pembentukan sebuah negara Papua yang merdeka, yang dilengkapi 70 putra Papua Barat yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifesto yang isinya, yaitu:

1. Menentukan nama negara: Papua Barat
2. Menentukan lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua
3. Menentukan bendera: Bintang Kejora

---

130 Syamsudin Haris, *Indonesia di Ambang Perpecahan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 182-183

4. Menentukan lambang negara: Burung Mambruk, dengan semboyan One Peole One Soul dan menentukan bendera Bintang Kejora dikibarkan pada tanggal 1 November 1961.<sup>131</sup>
5. Sebuah konstitusi yang terdiri dari 129 pasal dan juga disusun, dan konggres mengumumkan secara resmi “kebersamaan” sebagai prinsip utama negara yang baru berdiri.<sup>132</sup>

Rencana pengibaran bendera Bintang Kejora pada tanggal November 1961 tidak terlaksana karena belum mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1961 bendera Bintang Kejora dikibarkan di Hollandia dan lagu Hai Tanahku Papua dinyanyikan bersamaan dengan lagu Wilhelmus. Kegiatan pengibaran dan menyanyikan lagu kemerdekaan Papua Barat dilakukan terus menerus selama satu minggu sampai dengan dimulainya pemerintahan *United Nations Temporary Executive Asosiations* (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962.<sup>133</sup>

Aspek-aspek internasional yang menumbuhkan benih separatisme pada masa pergolakan politik, contohnya dari pengaruh internasional adalah adanya upaya Belanda untuk bekerjasama dengan Australia dibidang administrasi perbatasan, khususnya masalah karantina, kesehatan, kerjasama tehnik, dan juga pertukaran informasi mengenai perbatasan. Namun perjanjian itu dibuat pada bulan November 1957 itu tidak membahas masalah politik, karena Australia sebagai penguasa kolonial di PNG (saat itu bernama *The Territory of Papua and New Guinea*) takut akan adanya ketegangan dengan Indonesia apabila Indonesia berhasil mendapatkan Irian Barat. Alasan Australia adalah menjaga keamanan regional dengan Belanda dari pada dengan Indonesia, karena Australia takut bahwa Indonesia juga akan mengklaim PNG dan akan menyebarkan komunisme.

Namun, perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam masalah Irian Barat dari “Netralis Pasif” ke “Mediasi Aktif” telah mengubah sikap Australia untuk mendukung Indonesia dalam klaim Irian Barat (teritorial ini). Akhirnya Australia juga menghentikan kerjasama dengan Belanda pada tahun 1961. Melemahnya dukungan dari sekutu-sekutu Barat telah menyebabkan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Joseph Luns mengajukan “*Luns Plans*” kepada Majelis Umum PBB. Luns mengusulkan supaya sebuah organisasi atau badan internasional yang bernaung dibawah PBB, untuk mengambil alih kekuasaan atas Irian Barat

---

131 Yakobus F. Dumupa. *Berburu Keadilan di Papua*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm.. 30

132 Theodor Rathgeber. *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat: Studi Realita Sosial dan Perspektif Politis*. (Jakarta: Pustaka Harapan, 2006), hlm. 44

133 Yakobus F. Dumupa, op.cit., hlm. 30-31

dengan maksud untuk mempersiapkan rakyat Irian Barat untuk mengadakan penentuan nasib sendiri secepatnya di bawah kondisi yang stabil. Usulan Luns telah meningkatkan atau membangkitkan aktifitas para tokoh Irian yang pro-Belanda termasuk: Nicolaas Jouwe, P. Torey, Marcus Kaisiepo, Nicolaas Tanggahma, dan Elieser Jan Bonay melakukan konsolidasi dan juga telah mempersiapkan “kemerdekaan Papua Barat”.<sup>134</sup>

Akan tetapi, pemerintah Indonesia menuntut propinsi Irian Jaya diserahkan menurut pasal 11 ayat 6 *Charter of Acknowledgement of Indonesian Authority*. Belanda sudah menyatakan hak atas Irian Jaya menurut *Staatsblad* No. J. 567. Supaya pertentangan ini bisa diselesaikan beberapa konferensi diselenggarakan dari tahun 1949 sampai tahun 1960. Karena kedua pihak tidak bisa saling setuju diproklamasikan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) oleh Sukarno di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961, yakni:

1. Gagalkan pembentukan "Negara Papua" buatan Belanda kolonial;
2. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Ait Indonesia;
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.<sup>135</sup>

Pada saatnya pengumuman TRIKORA hubungan antara Indonesia dan Rusia menguatirkan pemerintah Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS sudah merencanakan pembentukan beberapa kubu di seluruh kepulauan Pasifik. Menumt pendapat AS, siapa yang menguasai Pasifik, menguasai dunia. Jadi, Presiden Kennedy berusaha untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan AS dan mendukung penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia. Sejak tahun 1950an Indonesia bertentangan dengan AS karena pemberontakan daerah di Sumatera dan Sulawesi utara didukung AS. Pada waktu itu, perang dingin sudah berjalan dan Presiden Kennedy telah menyadari Indonesia membeli persenjataan dari Rusia. Dia bertindak untuk menetapkan penguasaan atas pemerintah Indonesia. Indonesia memang terletak di daerah yang sangat strategis dan AS butuh menguasai lajur pelayaran untuk memudahkan perdagangan.

Sesuai dengan Perjanjian New York yang ditanda-tangani tanggal 15 Agustus 1962 oleh Indonesia dan Belanda di Markas Besar PBB, maka Indonesia harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 18 dari perjanjian tersebut yang berbunyi:

---

134 Saafroedin Bahar. *Integrasi Nasional*. (Jakarta: Ghlm.ia Indonesia, 1996), hlm. 220-221

135 Andrianto, Tuhana Taufiq. *Mengapa Papua Bergolak*, (Yogyakarta: Gama Global Media, 2001) hlm. 3

*Indonesia will make arrangements, with assistance and participatoin of the United Nations Representative and his staff, to give the people of the territory, the opportunity to exercise freedom of choice. Such arrangements will include:*

- a. Consultation (musyawarah) with the representative councils on procedures and methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population.*
- b. The determination of the actual date of the exercise of free choice within the period established by the present Agreement.*
- c. Formulations of the questions in such a way as to permit the inhabitans to decide (a) whether they wish to remain with Indonesia; or (b) whether they wish to sever ties with Indonesia.*
- d. The eligibility of all adults, male and female, not foreign national to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are residents at the time of the signing of the present Agreement, including those residents who departed after 1945 and who returned to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration.<sup>136</sup>*

Versi Bahasa Indonesia:

Indonesia akan mempersiapkan, dengan bantuan dan partisipasi perwakilan PBB dan stafnya, untuk memberikan kesempatan kepada rakyat rakyat Papua untuk melaksanakan Pemilihan secara Bebas. Proses persiapan meliputi:

- a. Konsultasi (musyawarah) dengan Dewan Perwakilan untuk memastikan tentang prosedur dan metode yang akan diberikan kepada rakyat untuk mengkespresikan pendapat.
- b. Menentukan tanggal aktual pelaksanaan pemilihan bebas di dalam periode yang dibentuk Perjanjian saat ini.
- c. Perumusan pernyataan sedemikian untuk mengijinkan warga Papua untuk memutuskan (a) apakah mereka ingin tinggal dengan Indonesia, atau (b) apakah menginginkan terpisah dari Indonesia.
- d. Seluruh orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dijalankan sesuai dengan aturan internasional. Dimana mereka yang punya hak pilih itu adalah mereka yang

---

136 Perjanjian New York 15 Agustus 1962 pasal 18

tinggal di Papua saat Perjanjian New York ditandatangani dan mereka yang berada di Papua ketika PEPERA dilaksanakan, termasuk mereka penduduk Papua yang meninggalkan Papua setelah 1945 dan kembali ke Papua dan menguruskan kembali kependudukannya setelah berakhirnya pemerintahan Belanda.

### 3.2 Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)

Berdasarkan Pasal 18 Perjanjian New York, dinyatakan secara jelas bahwa

Pemerintah Indonesia akan melaksanakan PEPERA dengan bantuan dan partisipasi dari utusan PBB dan stafnya untuk memberikan kepada rakyat yang ada di Papua kesempatan menjalankan penentuan pendapat secara bebas. Kemudian melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten yang ada di Papua untuk membicarakan metode pelaksanaan PEPERA ini. Selanjutnya, seluruh orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dijalankan sesuai dengan aturan internasional. Dimana mereka yang punya hak pilih itu adalah mereka yang tinggal di Papua saat Perjanjian New York ditandatangani dan mereka yang berada di Papua ketika PEPERA dilaksanakan, termasuk mereka penduduk Papua yang meninggalkan Papua setelah 1945 dan kembali ke Papua dan menguruskan kembali kependudukannya setelah berakhirnya pemerintahan Belanda.

Terdapat pula pengaturan pada isi pokok pasal 29 Perjanjian New York tersebut, antara lain:

1. Pemerintah Belanda segera menyerahkan pemerintahan di daerah Papua kepada Badan Pelaksana Administrasi Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962.
2. UNTEA selanjutnya segera menyerahkan kekuasaan Papua Barat kepada RI tanggal 1 Mei 1963.
3. Pemerintahan Indonesia akan melaksanakan pemerintahan di Papua Barat selama 6 (enam) tahun 1963-1969.
4. Tahun 1969 akan diadakan *Act of Free Choice*, dimana Papua bebas menentukan nasibnya sendiri dengan cara Satu Orang Satu Suara<sup>137</sup>

---

137 Perjanjian New York 15 Agustus 1962, pasal 29

Sejumlah orang yang berpendapat Papua sudah merdeka sejak tanggal 1 Desember 1961 pada saatnya sang Bintang Fajar dikibarkan di Jayapura (Port Numbay) di Irian Jaya. Adanya persengketaan antara kedua belah pihak itu memaksa Gubernur Belanda pada bulan Oktober 1961 membentuk Komite Nasional Papua yang terdiri dari 80 orang anggota. Sesuai dengan tujuannya, pembentukan Komite Nasional Papua mengeluarkan manifesto yang mengajukan masalah-masalah berikut ini:

1. menentukan bendera Papua
2. menentukan lagu kebangsaan Papua
3. penggantian nama West Nieuw Guinea menjadi Papua Barat
4. usul agar bendera Papua dikibarkan tanggal 1 Nopember 1961<sup>138</sup>

Meskipun demikian, kedaulatan atas Irian Jaya diserahkan kepada Indonesia untuk waktu sementara sehingga diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). PEPERA adalah semacam pemilu yang diselenggarakan tanggal 14 Juli - 2 Agustus 1969 untuk menentukan nasib Papua Barat. Dipilih 1026 orang (dari penduduk yang berjumlah 800.000 jiwa pada waktu itu) untuk membicarakan aspirasi-aspirasi masyarakat Papua. Sistem musyawarah ini dipakai oleh Indonesia karena alasannya sebagai berikut:

1. Rakyat dan Bangsa Papua masih primitif dan belum mengerti sistem (One Man One Vote) atau satu orang satu suara.
  2. Sulitnya jangkauan secara geografisnya diseluruh pelosok tanah Papua.
  3. Demi efektivitasnya dan efisiensi dana serta waktu.
  4. Terbatasnya penyediaan atau transportasi/angkutan laut dan udara
- Presiden pertama Indonesia, Soekarno mengumandangkan rencana militer

untuk mengembalikan Papua Barat (disebut Indonesia sebagai Irian Barat). Invasi

militer Indonesia terhadap Papua Barat menarik perhatian Internasional di tengah-tengah kecemasan Perang Dingin. Amerika kemudian menjadi mediator yang berupaya menarik simpati Indonesia dan menjaga Jakarta tidak masuk ke dalam sumbu Soviet.<sup>139</sup> Amerika mendukung integrasi Papua Barat ke Indonesia demi kepentingan kapitalismenya. Hal ini terjadi dalam proses persiapan sampai pelaksanaan PEPERA. Amerika, Belanda dan PBB menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Sedangkan rakyat Papua Barat tidak diikut sertakan

---

138 Andrianto, Tuhana Taufik op.cit hlm., 15

139 Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim. *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur, Filipina dan Papua New Guinea*. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 114

dalam pengambilan keputusan sejak dicetuskan *New York Agreement* sampai dilaksanakan, orang Papua Barat dijadikan “boneka mainan”.<sup>140</sup>

Pada fase peralihan (1963-1969) ada beberapa masalah di Irian Jaya, yang menyebabkan bangkitnya kembali sikap beberapa kalangan di Irian Jaya, antara lain:

1. Sikap sebagian pejabat di Irian Jaya seperti orang yang baru “menang perang”, sehingga menumbuhkan persepsi di kalangan penduduk asli bahwa pendatang itu adalah “*The New Colonial Masters*”.
2. Beberapa pejabat sipil dan militer juga mengangkut barang-barang peninggalan Belanda di Irian Jaya, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah pejabat itu “merampok Irian”, walaupun sebenarnya tidak sedikit pejabat pemerintah yang benar-benar berdedikasi dengan semangat untuk membangun Irian Jaya. Namun seperti peribahasa Indonesia “karena nila setitik maka rusak susu sebelangga”. Oleh karena itu, timbul pula sikap anti-Indonesia di Irian Jaya.
3. Indonesia pada saat itu tengah mengalami masa sulitnya ekonomi. Dampak ekonomi juga merembet ke Irian Barat. Dampak pertama adalah kesulitan untuk membangun Irian Barat, yaitu kebutuhan pokok penduduk pada saat itu sulit didapat di pasar, walaupun ada harganya sangat tinggi. Kesulitan yang kedua adalah banyaknya migrasi penduduk dari Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur ke Irian Barat. Khususnya dari Sulawesi Selatan dan Tenggara untuk mengadu nasib di wilayah Irian Barat. Hal ini sangat mengecewakan penduduk asli yang bukan saja tidak menikmati pembangunan, tetapi juga terpental dari posisi sebagai pedagang di pasar Irian Barat.
4. Keinginan pemerintah untuk memantapkan tertib administrasi di Irian Jaya, yang menyebabkan banyak orang-orang Irian yang terpental dari posisi di pemerintahan. Pada masa pemerintahan Belanda tidak sedikit orang Irian yang duduk dipemerintahan sebagai pegawai rendah dan menengah. Pemerintah Indonesia menganggap pegawai dari Irian tidak memenuhi standart kepegawaian, sehingga perlu diganti. Namun dampak politiknya timbul pandangan bahwa telah terjadi pengalihan posisi dari penduduk asli ke pendatang.<sup>141</sup>

Pemerintah Indonesia menetapkan PEPERA diselenggarakan menurut peraturan PBB hasilnya ditolak banyak orang Papua. Dalam catatan PBB, diketahui cuma 16 pejabat PBB dipergunakan untuk mengamati PEPERA itu (dibandingkan dengan 1000 pejabat PBB yang

---

140 Yakobus F Dumupa. *Berburu Keadilan di Papua*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 113

141 Saafroedin Bahar. *Integrasi Nasional*. (Jakarta: Ghlm.ia Indonesia, 1996), hlm. 223

mengamati pemilu di Tim-Tim 1999).<sup>142</sup> Apalagi pejabat-pejabat PBB sempat mengamati pemilihan 195 orang (dari jumlah 1026) yang memberikan suara dalam PEPERA.<sup>143</sup> Namun, menurut Perjanjian New York tidak ada ketetapan jelas yang menyangkut pemilihan peserta pemilu itu. Dalam Perjanjian tersebut tertulis orang Papua harusnya diberi kesempatan untuk membicarakan secara bebas. Menurut pasal 17 tertulis "*Act of Self-Determination*" ini harus diselenggarakan secara legal dan menurut peraturan internasional. Akan tetapi ada banyak orang Papua yang menyatakan peserta PEPERA itu dipaksa Kopassandha (sekarang KOPASSUS) untuk ikut integrasi.

Pemerintah Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat pada bulan Juli-Agustus 1969. Hasil PEPERA tersebut diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969 dengan perincian 84 (setuju), 0 (menentang), dan 30 (absten). Dengan demikian, secara hukum internasional sejak saat itu Irian Barat yang kemudian menjadi Irian Jaya resmi menjadi wilayah Indonesia.<sup>144</sup>

Reaksi Pemerintah RI dan perkembangan politik berikutnya membuat Papua Barat kemudian diintegrasikan dengan RI. Identitas dan nasionalisme Papua terkubur sementara bersamaan dengan penggantian nama Papua Barat menjadi Irian Barat dan integrasi kehidupan sosial politik ekonomi dan kebudayaan Papua di bawah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belasan tahun kemudian, tepatnya sejak 1978, melalui kesenian identitas Papua pernah dibangun kembali oleh kelompok Mambesak Arnold Ap. Namun, kepapuaan kembali terhambat karena Arnold Ap kemudian dipenjara oleh pemerintah RI di bawah Orde Baru. Menurut analisis pemerhati Papua di manca negara Arnold Ap kemudian dibunuh melalui suatu konspirasi yang melibatkan Kopassandha.<sup>145</sup>

Struktur-struktur masyarakat Papua yang terdiri dari kurang lebih 250 suku bangsa bersifat otonom satu sama lain. Setiap kelompok suku secara kultural mandiri dan unik, tidak tunduk pada yang lain, dan setiap suku memiliki kosmologi yang memandang dirinya sebagai pusat dari semesta. Setiap kepala suku atau pemimpin lokal tidak memiliki otoritas yang penuh kecuali sebagai juru bicara masyarakatnya. Interaksi yang terbatas di masa lalu belum

142 Saltford, John. "*United Nations Involvement with the Act of Self Determination in West Irian (Indonesia West New Guinea) 1968 to 1969*", hlm. 12

143 Ibid

144 Samsudin Haris. *Pergolakan di Perbatasan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 190

145 Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *West Papua: The Obliteration of People*, (London: Tapol) hlm. 125-136

memungkinkan tumbuhnya kesadaran budaya yang relativistik dan toleran. Oleh karena itu etnosentrisme menjadi persoalan dasar di dalam konsolidasi rakyat Papua. Di dalam kenyataan budaya semacam ini sulit tumbuh suatu kepemimpinan yang diakui oleh semua kelompok suku bangsa.<sup>146</sup>

Kelompok yang muncul di kota sesekali dengan simbol-simbol Papua Merdeka dalam bentuk unjuk rasa dan pengibaran bendera. Bagi mereka yang bergerak di hutan-hutan penyanderaan, kekerasan, dan pengibaran menjadi praktik simbolik perlawanan. Pada 1970-an Brian May mengutip sebuah tulisan di satu pintu rumah di Arso, sebelah selatan Jayapura, “*Before me are bayonets (Indonesian troops), behind me are knives and arrows (OPM Tribesmen)*.”<sup>147</sup> Pada akhirnya rakyat terseret menjadi korban kekerasan balik dari militer. Tidak disadari bahwa pilihan simbol dan praktik perlawanan itu justru melegitimasi kekerasan yang dilakukan oleh militer. Rakyat Papua Pegunungan Tengah adalah lapisan korban yang paling menderita dari strategi OPM dan praktik politik militer.

Fakta kultural yang penting untuk dicatat dari orang Papua adalah bahwa gerakan cargo cult atau kargoisme masih sangat populer di Papua. Tentang hal ini John Strelan<sup>148</sup> menulis bahwa kultus kargo berkaitan dengan gerakan-gerakan yang menekankan dan menggunakan ritus dan doktrin-doktrin religi dan magis untuk mencapai tujuan-tujuannya atau untuk memenuhi harapan-harapannya. Secara umum kultus kargo berarti semua gerakan yang mendambakan kedatangan kekayaan baik materi maupun rohani dengan cara apa pun walaupun caranya tidak memenuhi pandangan kriteria Barat. Kargoisme hanya menunjuk kepada doktrin-doktrin kargo, ideologi, mitos-mitos atau filsafat tentang kargo. Menurut Benny Giay pada prinsipnya kargoisme berhubungan dengan harapan atau impian masyarakat untuk mendapatkan pengakuan, status, kekayaan materi, kedamaian, dan kehidupan yang lebih baik.<sup>149</sup>

Sejak 1860 sudah ada laporan tertulis tentang gerakan-gerakan kargoisme. Pada waktu itu John Strelan menghitung sekitar 200 gerakan terjadi di berbagai tempat. Sejak kontak orang Papua dengan pendatang, dengan misionaris dan pejabat-pemerintah, gerakan ini semakin subur dan mengembangkan bentuk-bentuk barunya yang berorientasi pada

---

146 Bandingkan dengan studi yang sudah dilakukan oleh Johszua Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, (Jakarta-Leiden: LIPI-RUL)

147 Brian May, “*The United Nations fiasco*” dalam *The Indonesian tragedy*, (London: Routledge, 1978) hlm. 181

148 John G. Strelan, *Search for Salvation*, (Adelaide: Lutheran Publishing House, 1977) hlm. 10

149 Benny Giay, *Kargoisme di Irian Jaya*, (Jayapura: Region Press, 1986), hlm. 3

kekayaan materi produksi Eropa dan Amerika. Berdasarkan hasil penelitian para antropolog dan teolog dapat dikatakan bahwa sebagian besar kelompok suku bangsa Papua memiliki tradisi ini. Pada orang Dani, misalnya, ada Nabelan Kabelan,<sup>150</sup> orang Amungme mempunyai Hai.<sup>151</sup> Di Biak orang menjalankan Koreri.<sup>152</sup> Di pantai selatan Papua, orang Kamoro memiliki Otepe.<sup>153</sup> Kata Schoorl, orang Muyu mempunyai Ot,<sup>154</sup> dan seterusnya.

Gerakan kerakyatan orang Papua yang menuntut kemerdekaan, mulai dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965 hingga PDP pada 2000 juga terkait dengan spirit gerakan kargoisme. Pengibaran bendera Bintang Kejora, misalnya, diperlakukan sebagai ritus untuk menyambut datangnya “kemerdekaan.” Kibarannya dianggap seperti panggilan suci pada leluhur. Mereka seakan-akan berdoa, “Datanglah KerajaanMu. Bebaskanlah kami dari peluru, sangkur, dan bayonet. Suburkanlah kebunku dengan batatas dan keladi. Kembalikan hutanku agar sugu dan babi tersedia untuk kerabatku. Bersihkan sungaiku agar ikan dan udang kembali melompat ke perahuku.”<sup>155</sup>

Di Biak, misalnya, pada 2-6 Juli 1998, kegiatan pengibaran bendera terlihat jelas dijiwai oleh gerakan Koreri. Selama lima hari orang Papua dengan berani mempertaruhkan nyawa mempertahankan bendera dan “berperang” melawan polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bendera sengaja dikibarkan di tempat yang tinggi yaitu menara air kota Biak agar dengan mudah terlihat dari laut. Mereka yakin bahwa kapal induk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bersama Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan segera datang untuk memberikan bantuan makanan, senjata, dan mengakui kemerdekaan Papua. Seperti di Biak, gerakan kargoisme selalu gagal memenuhi keyakinan dan harapan. Tetapi keyakinan akan penantian itu tidak pernah mati. Ia akan selalu hidup kembali suatu saat.<sup>156</sup>

Dengan meningkatnya ketegangan, pada tanggal 26 Februari 1999 Presiden B.J. Habibie menerima sebuah delegasi yang disebut dengan “Tim 100” yang merupakan

---

150 Karl G. Heider, *The Dugum Dani: A Papuan culture in the highlands of West New Guinea*, (Chicago: Aldine Publishing Co., 1970)

151 Tom Beanal, *Amungme: Magaboarat Negel Jombe-Peibe*, (Jakarta: Walhi, 1997) hlm. 57-62

152 John G. Strelan dan Jan Godschlm.k, *Kargoisme di Melanesia*, (Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya, 1989) hlm. 17-21

153 Muridan S. Widjojo, *Orang Kamoro dan Perubahan Lingkungan Sosial Budaya di Timika, Irian Jaya*, (Jakarta: LIPI, 1997) hlm. 22-25

154 J.W. Schoorl, *Kebudayaan dan Perubahan Suku Muyu dalam Arus Modernisasi di Irian Jaya*, (Jakarta: Gramedia dan KITLV, 1997) hlm. 440-444

155 Lihat Muridan S. Widjojo, “Puisi Pengharapan Bintang Kejora”, dalam *Tempo*, 22 Oktober 2000, hlm. 37

156 Freerk Ch. Kamma menulis, “The most curious aspect of these movements is the fact that, inspite of repeated disappointments, the people never gave up hope. For them it was always ‘not yet’, and the next konoor, sometimes the very same person, could once more be assured of a following.” Lihat Kamma, *Koreri: Messianic Movements in the Biak-Numfor Culture Area*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1972), hlm. 103

perwakilan dari masyarakat Papua yang mengekspresikan keinginan mereka untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Sebagai tanggapan dari permintaan ini dan untuk memperkuat integritas territorial NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Pemerintah membuat UU (Undang-undang) No 45/99 tentang pemekaran Irian Jaya (Sekarang Papua) menjadi Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika dan Puncak Jaya dan Kota Sorong. Kebijakan ini diikuti dengan penunjukan Dokter Herman Monim sebagai Gubernur Irian Jaya Tengah dan Brigjen. Mar. (Pensiunan TNI) Abraham Atuturi sebagai Gubernur Irian Jaya Barat berdasarkan Keputusan Presiden RI No 327/M/1999, tanggal 5 Oktober 1999. Kebijakan di atas ditolak oleh pelbagai kelompok masyarakat di Papua, yang memperlihatkannya dengan sebuah demonstrasi besar, termasuk pendudukan gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Propinsi Irian Jaya dan kantor Gubernur di Dok II, Jayapura pada tanggal 14-15 Oktober 1999. Salah satu alasan dari penolakan ini adalah bahwa kebijakan ini diambil tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal. Jadi, masyarakat Papua merasa bahwa mereka dikucilkan dari proses pengambilan keputusan pada kebijakan tersebut. Pada tanggal 19 Oktober 1999, Sidang Umum dari Sesi ke 12 dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) melalui Ketetapan Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua MPR No. IV/MPR/1999 yang mendukung bentuk otonomi daerah dalam kerangka NKRI, yang diikuti dengan langkah-langkah strategis guna menanggapi keluhan-keluhan di Papua termasuk menghormati berbagai macam dan keragaman kehidupan sosial dan budaya di dalam masyarakat Papua juga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua melalui proses-proses pengadilan yang jujur dan adil. Sejak saat itu, keluhan-keluhan orang asli Papua ditanggapi.

Pada periode ini, B.J. Habibie digantikan oleh K.H. Abdurahman Wahid sebagai Presiden. MPR kemudian mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 mengenai rekomendasi-rekomendasi kebijakan dalam penerapan peraturan Otsus (Otonomi Khusus) untuk Aceh dan Papua dengan memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat daerah yang relevan. Setelah menampung pelbagai diskusi yang bertempat di dalam dan luar Papua mengenai Otsus dan mendapat masukan-masukan positif, DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) setuju untuk mengubah RUU (Rancangan Undang-Undang) mengenai Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua menjadi UU (Undang-Undang).

Berdasarkan ini, Presiden K. H. Abdurahman Wahid mengesahkan UU No. 21/2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus) untuk Propinsi Papua yang ditujukan untuk meningkatkan layanan-layanan umum, mempercepat proses pembangunan dan pendayagunaan keseluruhan

penduduk Propinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua. Dalam mandatnya untuk melanjutkan dan melaksanakan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999, sejak lahirnya UU No. 21/2001 mengenai Otsus untuk Papua menggarisbawahi beberapa elemen-elemen kunci penting dan yang diperlukan dalam menghadapi keluhan-keluhan di Papua seperti perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua dan mengurangi ketidaksetaraan antara masyarakat Papua dan daerah lain di Indonesia.<sup>157</sup>

### 3.3 Organisasi Papua Merdeka<sup>158</sup>

Kepergian Belanda dari Irian Jaya pada akhir bulan Desember 1962 yang diikuti pula beberapa tokoh yang anti-Indonesia termasuk di dalam kelompok ini adalah mantan anggota Dewan New Guinea, seperti Marcus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Herman Wamsiwor, dan juga Ben Tanggahma, Dick Sarwon, Jufuwai. Setibanya tokoh anti-Indonesia itu di negeri Belanda, mulailah terdengar adanya gerakan yang bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertujuan untuk memisahkan Irian Jaya dari Indonesia.<sup>159</sup>

Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi, baik di Irian Jaya maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra pro-Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat) lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Organisasi Papua Merdeka semakin populer, yaitu pada saat meletusnya pemberontakan senjata di Manokwari yang dipimpin oleh Permanes Ferry Awom pada tahun 1963 di Manokwari, serta pemberontakan atau aksi militer sporadis lainnya di berbagai wilayah Irian Jaya.<sup>160</sup>

Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikendalikan oleh warganegara Belanda. Warganegara Belanda tersebut menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengandalkan diri untuk membebaskan tanah Papua dan juga menonjolkan diri sebagai tokoh pejuang Papua Merdeka yang meminta dan menerima kewarganegaraan Belanda.

---

157 Yuliana Sugandi, *op.cit.*, hlm. 6-7

158 Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) diciptakan oleh para penegak hukum Indonesia ketika memproses peradilan Terianus Aronggear pada 1964 yang memimpin kelompok Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat. Sejak itu nama OPM dipakai oleh kelompok-kelompok yang kegiatannya menentang pemerintah RI. Lihat John R.G. Djopari. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, (Jakarta: Grasindo, 1993) hlm. 100-101.

159 Nazaridin Syamsudin. *Integrasi Politik di Indonesia*. ( Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm.. 96

160 Tuhana Taufik A. *Mengapa Papua Bergolak*. (Yogyakarta: Gama Global Media, 2001), hlm. 120

Sekurang-kurangnya ada 6 tokoh pimpinan OPM sebagai warga negara Belanda. Tokoh tersebut adalah: J.E. Papare bertempat tinggal di Apeldoorn, Herman Wasiwor bertempat tinggal di Den Haag, Bernadus Tangahma bertempat tinggal di Den Haag, F. Malaiholo bertempat tinggal di Hoogeveen, W.J. Aringaneng bertempat tinggal di Hoogeveen, dan O.A. Dakilwadjiir bertempat tinggal di Hoogeveen.<sup>161</sup>

Organisasi Papua Merdeka lahir dan tumbuh di Irian Jaya yang pada awalnya terdiri dari dua faksi. Faksi itu adalah:

1. Organisasi atau faksi yang didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura dan bergerak di bawah tanah. Faksi ini menempuh jalan kooperasi dengan pemerintah Indonesia, serta mengaitkan perjuangannya dengan gerakan yang bercirikan spiritual yaitu campuran antar agama adat atau gerakan dan agama Kristen. Perjuangan Aser Demotekay untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat atau Irian Jaya dengan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, dan meminta pemerintah Indonesia untuk menyerahkan kemerdekaan kepada Irian Jaya sesuai dengan janji Al Kitab, janji leluhur dan janji tanah ini bahwa bangsa terakhir yang terbentuk dan menuju akhir zaman adalah Papua Barat. Secara organisasi, kegiatan Organisasi Papua Merdeka pimpinan Aser Demotekay merupakan kegiatan pemujaan versi baru dan sangat tergantung pada Aser Demotekay.
2. Organisasi atau faksi yang didirikan oleh Terianus Aronggear (SE) di Manokwari pada tahun 1964. Organisasi ini pada awalnya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia baik secara politik maupun secara fisik bersenjata. Kegiatan ini diberi nama "Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Merdeka", yang kemudian lebih dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka<sup>162</sup>

Uraian tentang kandungan spirit kargoisme di dalam pergerakan Organisasi Papua Merdeka makin jelas dengan kutipan dari Brian May berikut ini:

*"In West Irian there was conviction that freedom was assured by that Arbiter of Justice, that Omnipotent Power of Powers, the United Nations; if the Indonesians dared to remain in West Irian when it was clear that the people wanted them to go, the United Nations*

---

161 Surat Kabar Suara Merdeka. 25 April 1969

162 JRG. Djopari. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), hlm. 101

would send in forces to fight alongside the OPM. Just as people along the coast near Madang<sup>163</sup> waited in vain for the divine cargoes, so villagers in North Biak trudged to hilltops overlooking the sea, where, they believed, a United Nations submarine would bring them food and guns.<sup>164</sup>

Kutipan tulisan Brian May yang meneliti di Papua pada sekitar akhir 60-an dan awal 70-an menunjukkan kompleksitas sekaligus karakteristik yang khas dari gerakan rakyat Melanesia. Ia tak dapat disebut semata-mata sebagai suatu gerakan politik atau gerakan perlawanan gerilya. Ia mengidap sesuatu yang secara psikologis jauh lebih kompleks daripada apa yang bisa didefinisikan sebagai suatu gerakan politik. OPM adalah suatu gerakan rakyat yang bersifat keagamaan yang isinya dijiwai oleh suatu ideologi keselamatan, pembebasan, dan pemakmuran melalui proses-proses yang bersifat gaib yang model-modelnya terdapat dalam mitos-mitos.

OPM lahir setelah serangkaian pertarungan kekuasaan yang melibatkan Pemerintah RI, Amerika Serikat, UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*), Pemerintah Belanda, dan sejumlah elit terdidik Papua yang berlangsung sejak 1962 hingga 1969. Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera atau *Act of Free Choice*) pada 1969 menandai “kemenangan” usaha integrasi Papua Barat oleh Pemerintah RI. Sebagian elit Papua yang Pro Belanda hijrah ke Belanda. OPM adalah juga ditumbuhkan dan dibesarkan oleh seluruh proses tersebut di atas yang di dalamnya tersimpan pengalaman ketakadilan oleh rekayasa berlebihan dari militer Indonesia. Sebagian elit Papua pimpinan OPM membangun perlawanan. Sejak itu para elit Papua ini mencoba melibatkan rakyat dalam usahanya “merebut kembali” kemerdekaan Papua Barat yang sempat mereka proklamasikan pada 1 Desember 1961.<sup>165</sup>

Pada tahun-tahun 1971-1976 adalah masa peningkatan hubungan antara elit pendiri OPM dengan rakyat Papua di pedesaan. Alih-alih menghancurkan OPM, represi militer Indonesia justru meningkatkan semangat resistansi terutama di kalangan rakyat pedesaan. Banyak penduduk desa kemudian bergabung dengan OPM. Area yang mereka kuasai pada umumnya adalah hutan-hutan di sekitar perbatasan Irian Jaya-Papua Nugini karena bergerak di kota-kota sangat tidak mungkin. Pada 1976 terjadi perpecahan di antara dua komandan militernya: antara Seth Rumkorem dan Jacob Prai. Faksi Prai menamakan dirinya “Pemka”

---

163 Madang adalah suatu daerah pantai di Papua Nugini. Brian May mengambil contoh kasus cargo cult di daerah Madang untuk menunjukkan karakteristik gerakan keagamaan di Papua Nugini yang sangat mirip dengan yang terjadi di Papua Barat atau Irian Jaya.

164 Lihat Brian May, *The Indonesian Tragedy*, hlm. 183

165 Robin Osborne, “OPM and The Quest for West Papuan Unity”, dalam R.J. May (ed.) *Between Two Nations*, (Australia: Robert Brown and Associates, 1986), hlm. 51-53

atau Pemulihan Keadilan dan membangun pasukan yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM. “Pimpinan” yang dalam pengasingan di mancanegara yakni Senegal dan Belanda tampaknya lebih mendukung Pemka. Sedangkan kelompok Rumkorem adalah faksi Victoria.<sup>166</sup>

Pada 1977-1978 OPM melancarkan perang gerilya dengan target para petugas pemerintah dan pendatang. Perang pecah terutama di wilayah suku Dani dan Damal, termasuk Amungme, di sekitar Pegunungan Tengah Kabupaten Jayawijaya. Kronologi Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih menunjukkan pertempuran sporadis di Jayawijaya sejak April 1977 hingga Agustus 1977.<sup>167</sup> Ratusan hingga ribuan orang Pegunungan Tengah Papua mendukung perang gerilya OPM. Mereka menyerang polisi, tentara, petugas pemerintah, dan pendatang. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Perang kemudian berakhir sementara dengan ditandai oleh kembalinya berbagai kelompok masyarakat ke desa masing-masing dan menyerah kepada Pemerintah RI.<sup>168</sup> Akibat dari gejolak politik ini, menurut Osborne, sekitar 3.000 orang Papua mengungsi ke Papua Nugini melalui jalur Pegunungan Tengah.<sup>169</sup>

Pada awal 1984 intelijen Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM akan melakukan serangan besar-besaran. Pada saat itu orang Papua gelisah akibat program transmigrasi yang dilaksanakan secara intensif di perbatasan Papua Barat-Papua Nugini. Pada saat yang sama militer Indonesia juga melakukan penangkapan sekitar 30 orang yang dicurigai sebagai anggota OPM. Salah satu korbannya yang terkenal adalah seorang kurator museum etnologi Universitas Cenderawasih Arnold Ap yang mencoba membangun identitas kepapuaan melalui kesenian. Ia bersama tiga temannya diyakini telah dibunuh oleh pasukan Kopassus.<sup>170</sup> Pada saat itu dua faksi OPM aktif melakukan serangan-serangan terbatas di Biak, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Salah satu aksinya yang diliput media secara luas adalah pengibaran bendera di halaman kantor Gubernur.

Strategi penggalangan rakyat di pedesaan untuk bergabung dengan OPM pada awal 1970-an hingga sekarang juga tidak berkembang. Melalui temuan peneliti Universitas

---

166 Ibid., hlm. 54-56

167 Lihat juga Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, hlm.. 121-12.

168 Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, “*Military report of incidents in the District of Jayawijaya in 1977*” dalam *West Papua: the obliteration of a people*, (UK: Tapol, 1988) hlm. 119-124

169 Robin Osborne, “*OPM and the Quest for West Papuan Unity*”, hlm. 57

170 Ibid., hlm. 59

Cenderawasih S.A. Patty<sup>171</sup> terungkap bahwa OPM dalam menggerakkan perlawanan rakyat hanya menggunakan apa yang disebut Patty sebagai “janji-janji muluk” kepada rakyat pedesaan. Brian May, dengan menyitir antropolog Belanda F.C. Kamma, juga melihat gerakan OPM sebagai gerakan cargo cult.<sup>172</sup> Ini menunjukkan bahwa salah satu strategi pimpinan OPM adalah memanfaatkan aspirasi-aspirasi kemakmuran dan keselamatan dalam mitos-mitos kargoisme untuk menarik hati rakyat.

Kelemahan dari strategi kargoistik adalah sifat mistik dan gaib dari proses kemerdekaan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Meskipun efektif untuk menarik minat rakyat di pedesaan, pendekatan ini hanya menjadi afirmasi bagi mitos-mitos orang Papua tentang jaman milenia baru. Rakyat tidak didorong untuk memperoleh pemahaman baru untuk menerima suatu perjuangan politik yang lebih programatik dan pencapaian politik secara bertahap dalam perjuangan jangka panjang. Akibatnya dapat dipastikan dengan mudah. Para pengikutnya pasti akan kecewa dalam kurun waktu tertentu karena harapannya tidak kunjung tercapai. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa orang Papua hari ini menjadi aktivis OPM lalu karena hal tertentu pada hari berikutnya kembali ke kota dan ikut program pemerintah. Hal sebaliknya juga “dengan mudah” terjadi. Ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan kebebasan politik yang relatif lebih besar, OPM tidak lagi memimpin. Kepemimpinan itu justru diambil alih oleh elit-elit Papua di perkotaan terutama Jayapura dalam bentuknya sebagai Presidium Dewan Papua (PDP).

### 3.3.1 Struktur Organisasi Papua Merdeka<sup>173</sup>

Organisasi Papua Merdeka (OPM) berdiri tahun 1965, terfragmentasi dalam berbagai kelompok gerilya dan organisasi kecil serta tidak memiliki sistem komando yang terpusat dan sistem persenjataan yang cukup. Dasar pengorganisasian masih dipengaruhi oleh identitas kesukuan masing-masing anggota dan pemimpinnya. Pemimpin OPM yang terpopuler adalah Kelly Kwalik dari suku Amungme. Selain OPM, juga terdapat Tentara Pembebasan Nasional OPM (TPN-OPM) yang dibentuk saat kelompok OPM membentuk cabang militer yang berpusat di Papua pada tahun 1960-an. Organisasi ini dipimpin oleh Mathias Wenda dan memiliki 9 daerah perlawanan yang bersifat independen dan otonom.

171 S.A. Patty, “Penduduk Dani Barat dan Pembangunan”, dalam E.K.M. Masinambow dan Paul Haenen (eds.), *Kebudayaan dan Pembangunan di Irian Jaya*, (Jakarta: LIPI-RUL, 1994) hlm. 127.

172 Brian May, *The Indonesian Tragedy*, hlm. 182

173 Muridan S Widjojo, *Papua Road MAP: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. (Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Indonesia) hlm. 23-25.

Pada tahun 1963-1969, tujuan OPM ialah mempengaruhi hasil PEPERA agar hasilnya kemerdekaan melalui referendum.<sup>174</sup> Sejak tahun 1980-an, aksi OPM berupa penyerangan dan penyanderaan yang bersifat sporadis. Meskipun kekuatan OPM secara militer tidak signifikan namun memberi legitimasi bagi kehadiran TNI di Papua.

Bagi nasionalis Papua, OPM secara historis sinonim dengan perjuangan kemerdekaan. Namun saat ini, banyak orang yang tidak menganggap OPM adalah pusat dari perjuangan kemerdekaan rakyat Papua. Secara tradisional, OPM terdiri dari dua fraksi yaitu kelompok Victoria yang dipimpin oleh Seth Rumkoren dan kelompok PEMKA (pemulihan keadaan) yang diketuai oleh Jacob Prai. Masing-masing kelompok memiliki sayap militer yaitu TPN merupakan sayap dari Victoria Group sedangkan PAPENAL (Pasukan Pembebasan Nasional) dari PEMKA group. OPM bersama aktivis Papua di Luar Negeri dan LSM radikal cenderung menggunakan strategi diplomasi internasional dan kehilangan kepercayaan untuk melakukan dialog. Praktik-praktik militer OPM dapat dilihat pada penyerangan-penyerangan terhadap pos-pos TNI di Tanah Papua pada masa Orde Baru.<sup>175</sup>

Pasca rezim politik Orde Baru, perjuangan OPM adalah melakukan respons perubahan dengan membentuk “*National Coalition*” dan “*United Fronts*”. Salah satunya adalah pembentukan *National Liberation Council (NLC)*, dipimpin oleh Amos Indey, Toto, dan Rumkoren. Dewan ini mengorganisir organisasi-organisasi massa yang sudah berdiri pada tahun 1960-an seperti Semangat Angkatan Muda Papua Anti-Republik Indonesia (SAMPARI), Operasi Organisasi Papua Merdeka (OOPM), dan Gerakan Nasional Papua (GNP). Pada Juni 2003, atas inisiatif Tom Beanal dan John Otto Ondawame, pertemuan pemimpin-pemimpin Papua Barat diselenggarakan di Nieuwegein, Utrecht, Netherlands untuk melakukan rekonsiliasi antar pejuang-pejuang Papua (Singh 2004:144).<sup>176</sup> Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan di Lae, Papua New Guinea pada 28 November – 1 Desember 2005 yang menghasilkan berdirinya *West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)* yang bermarkas di Port Villa. Dewan ini memiliki sayap militer yang terpisah dari OPM, yakni *The West Papua National Liberation Armed Forces* yang diketuai oleh Mathias Wenda.<sup>177</sup>

---

174 Bilveer Singh, *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood*. (Transaction Publisher, 2008), hlm. 12

175 Timo Kivimäki, Ruben Thorning. *Democratization and Regional Power Sharing in Papua/Irian Jaya: Increased Opportunities and Decreased Motivations for Violence*. (California: University of California Press, 2002), hlm. 651-672

176 Bilveer Singh. op.cit., hlm. 144-145

177 Ibid. Hlm. 147

#### **a. Presidium Dewan Papua (PDP)**

Pembagian kelompok kemerdekaan dapat dibagi menjadi dua yaitu militant seperti OPM dan moderat yaitu PDP. PDP adalah lembaga politik pro-kemerdekaan yang dibentuk melalui Kongres Rakyat Papua kedua di Jayapura pada Mei-Juni 2000. PDP merupakan satu-satunya lembaga yang secara informal memiliki legitimasi politik, sosial, dan budaya secara luas dari masyarakat Papua. PDP membawahi panel Papua yang dibentuk di semua kabupaten dan diharapkan mewadahi aspirasi politik pro-kemerdekaan. Agenda utama PDP adalah pelurusan sejarah integrasi Papua dan memperjuangkan kemerdekaan Papua secara damai. Namun, setelah tiga tahun berdiri, PDP banyak menghadapi kekerasan politik dan belum menunjukkan strategi politik yang jelas dalam menjalankan dua agenda politiknya. Lembaga ini diketuai oleh (alm) Theys H Eluay yang pernah menjadi anggota Fraksi Golkar DPRD Papua. Pasca terbunuhnya Theys, gerakan politik PDP menjadi lemah dan tidak signifikan dalam perjuangan rakyat Papua.<sup>178</sup>

#### **b. Dewan Adat Papua (DAP)**

DAP bergerak dalam wilayah sosial budaya. Lembaga ini dibentuk untuk menghimpun berbagai pemimpin suku/adat dan menggunakan perjuangannya pada masalah-masalah hak ulayat dan kebudayaan Papua. Perjuangan utama lembaga ini adalah menegakkan hak-hak dasar rakyat Papua yang berkaitan dengan indigenous and community rights. Dibentuknya DAP adalah karena pengalaman rakyat Papua yang terkait dengan perusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar dan pemiskinan rakyat Papua. Slogan yang diperjuangkan oleh DAP adalah “rakyat itu kaya tetapi miskin diatas kekayaannya”. DAP berjuang agar rakyat Papua mampu berusaha sendiri, menjadi tuan di negeri sendiri, dan menikmati kekayaan alam yang dimilikinya.

Ketua DAP pertama kali adalah Tom Beanal dengan dua Sekjend yaitu Sekjend DAP, Leo Imbri, dan Sekjend Pemerintah Adat, Fadhal Alhamid. Perbedaan dengan PDP adalah jika PDP bergerak dalam aspek politik perjuangan kemerdekaan Papua, maka DAP lebih memfokuskan pada aspek sosial budaya perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua. DAP saat ini dipimpin oleh Forkorus Yaboisembut. DAP menjadi pelopor dalam demonstrasi pengembalian Otsus ke Pemerintah pada 12 Agustus 2005 dan menjadi panitia dalam

---

178 Timo Kivimäki, Ruben Thorning. *op.cit.*, hlm.. 651-672

peringatan hari bangsa pribumi pada 6 Agustus 2008 yang diwarnai oleh insiden pengibaran bendera bintang kejora.

### 3.3.2 Pergerakan Organisasi Papua Merdeka

KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) oleh orang Papua lebih dipandang sebagai lembaga korporatif yang dekat dengan militer dan pemerintah.<sup>179</sup> Selain KKSS, belum ditemukan asosiasi pendatang yang berupaya meningkatkan posisi tawar dan kualitas representasinya di hadapan militer, pemerintah, maupun penduduk asli. Hingga 2001 belum terlihat upaya rekonsiliasi dan negosiasi antara kelompok pribumi Papua dengan pendatang. Sebagian besar pendatang dicekam ketakutan, ketakpastian masa depan, dan terbatasnya pilihan-pilihan. Pendatang pun sebagian berpikir untuk dan sebagian lainnya sudah meninggalkan tanah Papua. Tetapi mereka yang merasa terdesak dan harus mempertahankan diri mencoba mempersenjatai diri dengan senjata rakitan yang lebih efektif untuk membunuh dibandingkan dengan senjata orang Papua semacam parang, tombak, atau panah. Reaksi ini justru meningkatkan lingkaran kekerasan di Papua. Ketegangan hubungan pendatang-pribumi berada pada titik terburuk. Pembantaian pendatang oleh orang Dani pada Oktober 2000 di Wamena merupakan penegasan atas ketegangan itu.

Keadaan menjadi lebih buruk bagi transmigran karena mereka menjadi korban di dalam pertarungan OPM melawan militer Indonesia. Transmigran di Arso, Jayapura, adalah contoh di mana transmigran menjadi bulan-bulanan di tengah konflik dan pertarungan politik. Kasus transmigran Satuan Pemukiman (SP) 7 dan SP 8 Bonggo Jayapura yang meninggalkan lokasi karena teror dan mengungsi ke LBH Jayapura menjadi puncak gunung es dari problem transmigrasi di Papua. Sejak Januari 1999 hingga pertengahan 2001 mereka terlantar, tidak mendapat perhatian. Akibatnya selama mengungsi sudah 22 orang meninggal karena berbagai penyakit.<sup>180</sup> Bagi OPM transmigran merupakan target yang paling mudah untuk melakukan tekanan terhadap Pemerintah RI dan militer. Bagi militer, transmigran yang terancam dapat menjadi dalih yang efektif untuk membangun citra Papua sebagai wilayah yang rawan dan tidak stabil dari segi keamanan.

---

179 Secara berimbang pada 1986 Aditjondro menguraikan dampak negatif dan positif dari kehadiran migran asal Sulawesi di Papua (waktu itu disebut Irian Jaya). Lihat George Y. Aditjondro, *"Suatu Telaah Dampak Migrasi Suku-suku Bangsa dari Sulawesi Selatan dan Tenggara ke Irian Jaya"* Laporan Seminar Pengembangan SDM di Irian Jaya (Jakarta: LRKN LIPI) hlm.. 26-47.

180 "Jenazah Koprak diusung ke DPRD Papua," Kompas, 22 Juli 2000.

Transmigrasi sebagai kebijakan Pemerintah RI dipandang sebagai upaya yang bersifat “kolonialistik” untuk membuat orang Papua menjadi minoritas di tanahnya sendiri. “Jawanisasi” adalah stigma umum yang berkembang baik di kalangan intelektual Papua maupun birokrat Papua tentang transmigrasi.<sup>181</sup> Sikap anti transmigrasi ini semakin berkembang sejalan dengan berbagai wacana tentang peminggiran orang Papua pada satu sisi dan dominasi pendatang pada sisi lain. Selain itu proses implementasi program transmigrasi, terutama proses pembebasan lahan, dipandang penuh manipulasi dan intimidasi terhadap penduduk setempat. Oleh sebab itu, pada Februari 2000 Wagub R.G. Djopari mengusulkan agar transmigrasi ditunda dan diutamakan program pemberdayaan orang Papua.<sup>182</sup>

Pemerintah terutama pemerintah daerah di Papua kehilangan sebagian besar wibawa dan otoritasnya. Dari kasus tahun 2000 dapat diambil beberapa contoh. Pada 7 Februari massa rakyat menyegel 10 kantor pemerintah kabupaten Sorong dan menuntut bupatinya mundur. Sembilan hari kemudian di Merauke massa rakyat mengamuk merusak kantor RRI dan kantor Bupati yang waktu itu sedang kampanye otonomi khusus. Pada 19 Maret Bupati Fakfak dan ajudannya dikeroyok oleh massa. Pada Mei, ketika Wakil Presiden Megawati berkunjung ke Papua, terjadi perusakan rumah dan mobil dinas Bupati Jayawijaya. Di Biak mobil Ketua DPRD II disandera oleh massa.<sup>183</sup>

Inheren dalam wacana Papua Merdeka adalah adanya dominasi pendatang atas orang Papua di dalam berbagai bidang termasuk sektor birokrasi. Kesempatan ini digunakan oleh para birokrat putra Papua untuk menghembuskan isu “papuanisasi” dan tujuan praktisnya adalah merebut posisi-posisi pimpinan birokrasi pada level propinsi dan kabupaten. Pada kurun 1999-2001 praktis terjadi papuanisasi jabatan-jabatan penting semacam gubernur hingga kecamatan dan kepala desa.<sup>184</sup> Dalam situasi semacam itu rasionalitas penjenjangan

---

181 Sikap anti transmigrasi tidak hanya melanda kalangan intelektual Papua, tetapi juga kalangan birokrat dan anggota DPRD I Irian Jaya yang orang Papua asli. Peristiwa terkabung-kabungnya warga eks transmigran Bonggo SP 7 Jayapura yang mengungsi di LBH Jayapura adalah contoh konkrit. Sejak mengungsi Pemda Irian Jaya terkesan tidak peduli bahkan setelah 22 orang di antaranya meninggal karena berbagai penyakit seperti malaria, TBC, infeksi saluran pernafasan, dan stres. Lihat “*Jenazah Kopral Diusung ke DPRD Papua,*” Kompas Online, 21/7/2000.

182 “*Tunda, Transmigrasi ke Papua,*” Kompas, 11 Februari 2000. Diskusi tentang transmigrasi sudah pernah ditulis dengan kritis oleh George Aditjondro, 1986, “*Transmigration in Irian Jaya: Issues, Targets, and Alternative Approaches,*” Amsterdam 28-29 April 1986. Makalah tak terbit. Di dalam makalahnya Aditjondro mencoba menepis 4 isu populer yang berkembang di Papua Nugini, Australia, dan Belanda, yakni: ‘Jawanisasi’, ‘Islamisasi’, ‘Militerisasi’ dan pengambilalihan tanah secara tidak adil. Ia mengatakan bahwa tuduhan itu tidak relevan lagi ketika berdasarkan Keppres 1986 transmigrasi tidak lagi dari Jawa tetapi juga Bali, Timor, Flores, Sumba, dan lain-lain. Juga dari segi agama kebanyakan transmigran non-Jawa adalah Kristen. Lihat hlm.. 5-6.

183 “*Kronik Politik Papua 2000*”, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 2001.

184 Bandingkan “*Papuanisasi Segera Dimulai di Papua,*” Kompas, 22 Juni 2000. Secara verbal, sebagaimana diutarakan oleh Wagub R.G. Djopari, papuanisasi adalah perluasan kesempatan dan peningkatan kesejahteraan orang Papua di dalam konteks otonomi daerah. Meskipun R.G. Djopari mengatakan bahwa papuanisasi berbeda

karir berdasarkan golongan, pendidikan, dan kemampuan tidak lagi berlaku. Rasionalitas birokrasi yang pada era Orde Baru hanya sebatas ucapan kini semakin parah karena didominasi dengan isu primordial.

### 3.4 Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

Kehadiran Militer sebagai bagian dari upaya pengamanan setelah Papua menjadi bagian dari Indonesia tidak serta merta dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua. Praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan khususnya militer telah menimbulkan skeptisme dari masyarakat terhadap institusi keamanan. Selama pelaksanaan Operasi yang dilakukan pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, telah terjadi berbagai pelanggaran baik saat penangkapan, perlakuan terhadap tawanan maupun pelanggaran HAM lainnya. Berikut beberapa pelanggaran terhadap HAM yang pernah terjadi di Papua:<sup>185</sup>

1. Pembunuhan Arnold Ap (1984) seorang antropolog pada masa Orde Baru. Dimana Arnold Ap diculik oleh tentara berpakaian preman dari kesatuan Kopassandha dengan mobil tanpa plat.<sup>186</sup>
2. Pelanggaran HAM terhadap Suku Amungme di wilayah PT Freeport Indonesia oleh Militer Indonesia (1973-1995)
3. Penyiksaan di Distrik Paniai dimana interogasi yang dilakukan oleh Militer terhadap warga Paniai dilakukan dengan tindakan kekerasan seperti merendam warga di parit atau menyiram dengan air dingin.
4. Penembakan sewenang di Kemtuk-Sentani dan di Desa Madi. Penembakan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap non kombatan.
5. Pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay.
6. Kasus Wamena. Kasus tersebut terjadi bermula dari pembobolan gudang senjata milik Markas Kodim 1702/Wamena, Jayawijaya pada 4 April 2003 oleh kelompok tak dikenal. Penyerangan tersebut menyebabkan dua orang tewas. Pihak kodim menduga penyerangan dilakukan oleh OPM di bawah pimpinan Yustinus Murib dari wilayah Kwiyawage, Distrik Tiom. Aparat TNI melakukan serangan balasan ke

---

dengan jwanisasi namun dalam praktiknya kedua terminologi itu mengacu pada praktik politik yang kurang lebih sama.

185 Al Araf dkk, *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua*, (Jakarta: Imparsial, 2011), hlm. 145-161.

186 Robin Osbern, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001), hlm. 319.

perkampungan dan pedesaan di Kabupaten Jayawijaya dimana terjadi perampasan benda seperti surat berharga, uang, anak panah, mesin ketik serta terjadi penangkapan, penyiksaan, penganiayaan, penembakan dan pembunuhan terhadap penduduk sipil.

### 3.5 Kebijakan Militer Pemerintah

Kebijakan militer yang terjadi baik pada masa integrasi Papua maupun pasca integrasi yang dilakukan pada era Orde Lama dan Baru. Sepanjang Orde Baru, Presiden Soeharto menggunakan pendekatan keamanan dalam mengatasi pemberontakan bersenjata di dalam negeri. Setidaknya terdapat beberapa jenis operasi militer yang terbilang besar, yaitu di Jayapura (1977-1978) dan pada 1996-1998 di Bela, Alama, Jila dan Mapenduma yang dilansir banyak pihak terjadi pelanggaran HAM. Rezim Orde Baru menjadikan Papua sebagai daerah kekuasaannya. Hal ini dikarenakan para petinggi militer telah menggunakan kekuatannya untuk mendominasi politik dan pemerintahan setempat.<sup>187</sup>

Dengan maraknya pengibaran bendera dan tuntutan kemerdekaan, pada awal 1999, militer dapat dikatakan berhasil mempertahankan keberadaan pasukan nonorganiknya di Papua. Pada 6 Januari 1999 Panglima Daerah Militer (Pangdam) Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring menyatakan bahwa belum saatnya penarikan pasukan yang berasal dari luar Papua karena masih diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Lima hari kemudian Kapendam Trikora Letkol (Inf.) Herry Risdiyanto menegaskan kembali bahwa Kodam Trikora tidak akan mengurangi pasukan nonorganiknya. Bahkan Aster Kasdam Kolonel (Art.) Wais Ningkeula mengecam wakil rakyat dan pengamat yang hanya bisa menghujat TNI tetapi tidak pernah terjun ke pedalaman.<sup>188</sup>

Untuk menandingi berbagai kelompok atau komite pendukung “Merdeka” pada Februari-Maret 2000 dibentuk kelompok milisi Satgas Merah Putih dan kemudian menyusul pembentukan Satgas Pemuda Pembela Negara bentukan militer. Pada Agustus 2000 Satgas Merah Putih di Jayapura melakukan unjuk kekuatan dan menantang Satgas Papua untuk tampil. Bentrok pertama Satgas Merah Putih dengan pemuda Papua pendukung “Merdeka” terjadi di Fakfak pada 22 Maret 2000. Sejumlah pendukung Papua Merdeka ditahan namun

---

187 Sendius Wonda, *Jeritan Bangsa, Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Galangpress, 2009), hlm. 108

188 Pernyataan ini merupakan reaksi terhadap kritik Drs. Very Pioh bahwa ABRI tidak konsekuen dengan pernyataannya semula untuk menarik pasukan nonorganiknya. Lihat Theo van den Broek ofm dan J. Budi Hernawan, ofm., “*Bagian I: Kronik 1999*” dalam *Memoria Passionis di Papua*, (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura: Jakarta, 2001), hlm.. 4.

pihak Satgas Merah Putih dibebaskan. Bentrok berikutnya terjadi antara Satgas Papua dengan polisi di Jayapura yang menimbulkan korban jiwa.<sup>189</sup>

Pada prinsipnya, terdapat dua tipe operasi yang dilaksanakan TNI, yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal tersebut terinci dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua tipe operasi tersebut dibedakan menurut jenis ancaman yang dihadapi, OMP dikhususkan untuk menghadapi ancaman tradisional yang berupa kekuatan militer Negara lain, sedangkan OMSP dikhususkan sebagai operasi yang dapat bersifat mandiri maupun terpadu dengan instansi-instansi lain untuk menghadapi lawan yang berbentuk selain Negara.<sup>190</sup>

Pasca reformasi penempatan pasukan TNI di Papua masih dilakukan. Secara umum, gelar pasukan TNI di kawasan Papua bertujuan untuk menciptakan kondisi pertahanan terhadap daerah Timur Indonesia yang optimal.<sup>191</sup> Kebijakan operasi yang dilakukan oleh TNI di kawasan Papua telah mengalami perubahan. Upaya yang dilakukan oleh TNI bersifat pertahanan, berbeda dengan penekanan pada Orde Baru fungsi TNI di kawasan Papua dikhususkan untuk keamanan Internal.<sup>192</sup>

---

189 ELS-HAM Papua, "Menyimak Peta Potensi Konflik di Papua Barat," Analisis intern tak terbit, Jayapura, tanpa tanggal, hlm.. 6.

190 Al Araf dkk, *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua.* (Jakarta: Imparsial, 2011), hlm. 99

191 Al Araf dkk, op.cit., hlm. 103

192 Al Araf dkk, op.cit., hlm. 118